

**PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PPh BADAN PADA
YAYASAN PENDIDIKAN "X"**

DI SURABAYA

KK
A 177/03
Set
P

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH :

VIRENY SETYANINGRUM
No. Pokok : 049912607 - E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

SKRIPSI

**PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PPh BADAN PADA
YAYASAN PENDIDIKAN "X"
DI SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH :

VIRENY SETYANINGRUM

NO. POKOK : 049912607 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

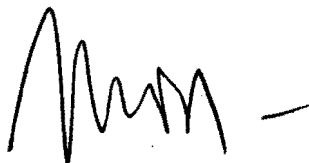
DOSEN PEMBIMBING



Drs. H. HERU TJARAKA, Msi.Ak.
NIP. 132 054 304

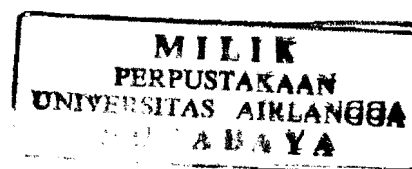
TANGGAL: 7-7-2003

KETUA PROGRAM STUDI



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS.Ak.
NIP. 131 287 542

TANGGAL: 7-7-2003



Surabaya, 3-6-2003

Skripsi ini telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Heru Tjaraka', with a horizontal line underneath.

Drs. H. HERU TJARAKA, Msi.Ak
NIP. 132 054 304

ABSTRAK

Bagi negara Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Sedangkan bagi Wajib Pajak, pajak merupakan iuran yang seringkali dianggap sebagai biaya yang memberatkan. Sehingga Wajib Pajak akan berusaha menekan seminimal mungkin jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan. Jumlah pajak terutang ditentukan dari Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak.

Dalam upaya menekan jumlah pajak terutang dibutuhkan suatu perencanaan yang baik. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan suatu langkah – langkah manajemen yang terintegrasi dan upaya perencanaan untuk mengurangi beban pajak seringkali disebut dengan *Tax Planning*.

Tax planning dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian – pengecualian dan celah- celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh Undang Undang no 17. Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sehingga *tax planning* tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak.

Penelitian ini difokuskan pada upaya penghematan pajak terutang pada yayasan pendidikan yaitu dengan cara memaksimalkan biaya – biaya fiskal dan menekan jumlah biaya yang tidak diperbolehkan oleh Undang Undang Perpajakan. Dalam hal ini biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dialihkan menjadi biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Biaya tersebut adalah biaya sumbangan kegiatan non pendidikan yang dialihkan menjadi biaya beasiswa bagi yang berprestasi dan biaya sumbangan untuk karyawan dialihkan menjadi biaya pelatihan dan seminar. Upaya lain yang dapat diterapkan adalah pemberian tunjangan pajak (PPh 21) atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.